

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam persaingan yang terus meningkat dan perkembangan bisnis di era globalisasi dewasa ini telah memunculkan sektor ekonomi sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam elemen kehidupan bermasyarakat. Persaingan yang semakin pesat, mengharuskan adanya keseimbangan antara pemenuhan segala bentuk fasilitas dan kesesuaian fasilitas tersebut terhadap kebutuhan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam rangka mempersiapkan dan mengantisipasi sektor ekonomi agar dapat menghadapi persaingan internasional.

Perusahaan memiliki kaitan erat dengan lingkungan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun perusahaan terkadang mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat dengan mengeksploitasi sumber daya alam dalam memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan *shareholder* semata. Orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari orientasi untuk *shareholder* dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi semata menuju ke arah kesinambungan lingkungan dan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak sosial (Hadi, 2011).

Semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka semakin banyak dampak yang dihasilkan, terutama perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan alam, salah satu contohnya yaitu perusahaan pertambangan. Dampak-dampak tersebut lebih cenderung ke arah negatif, sehingga pemerintah menerapkan sistem tanggung jawab sosial perusahaan. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi perhatian banyak pihak, dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang semakin kritis atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial. Telah ada pengakuan bahwa pengguna laporan keuangan tidak terbatas kepada pemegang saham, calon investor, kreditor dan pemerintah semata, namun telah meluas kepada komponen lain. Akuntansi sebagai alat pertanggung-jawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali utama terhadap aktivitas perusahaan. Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari perusahaan akuntansi berupaya mengakomodasikan perubahan tersebut dengan melahirkan sub-disiplin yaitu akuntansi sosial. Bila selama ini produk akuntansi dianggap sebagai pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik saham, kini paradigma tersebut diperluas sebagai pertanggung jawaban kepada seluruh *stakeholders* (konsumen, karyawan, masyarakat, pemilik, investor, pemerintah, dan pemasok). Perluasan paradigma ini merupakan kontribusi besar disiplin akuntansi bagi masyarakat.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial sangat penting bagi pemegang saham ataupun *stakeholder*. Calon investor akan lebih memilih perusahaan yang

menjalankan program pertanggungjawaban sosial secara berkelanjutan karena perusahaan akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan jangka panjang untuk perusahaan, khususnya pemegang saham. Bagi *stakeholder*, pengungkapan pertanggungjawaban sosial penting karena *stakeholder* membutuhkan informasi dan bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan

Semakin kuatnya tekanan *stakeholder* dalam hal pengungkapan praktik-praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam akuntansi. Pengungkapan dan penyajian informasi merupakan suatu upaya fundamental untuk menyediakan informasi mengenai laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam pengungkapan dan penyajian informasi tersebut dibutuhkan sebuah aturan atau standar. Standar akuntansi secara umum diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. (Belkaoui, 2006 dalam Situmorang, 2011). Standar akuntansi perusahaan yang berkualitas yang terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat diandalkan serta berguna bagi investor, kreditor dan pihak lain untuk membuat keputusan alokasi modal (SEC, 2000, dalam Situmorang, 2011).

Lebih jauh lagi, adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Terdapat juga peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Krapik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran dewan komisaris.

Faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah profitabilitas. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Bowman dan Haire (1976) dalam Fahrizqi (2010) bahwa kepekaan sosial membutuhkan gaya managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2005) Berdasarkan teori agensi, tingkat *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)

mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, manajemen perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*. Karena dengan semakin tingginya ratio DER maka kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kontrak akan lebih besar, Oleh karena itu manajer akan menggunakan metode akuntansi yang memaksimalkan laba yang ada dengan cara mengurangi biaya yang ada salah satunya biaya pengungkapan sosial.

Sembiring (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa size perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sosial. Penelitian Balkaoui dalam Anggraeni (2006) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibanding perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit.

Beberapa tahun terakhir *International Financial Reporting Standards (IFRS)* menjadi topik yang hangat di tanah air. Pertemuan G-20 tahun 2008 di Washington (USA) menghasilkan beberapa poin penting, salah satu poin penting tersebut adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan kesepakatan anggota G20, peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan tercapai jika regulator suatu negara menetapkan *a single set of high quality global accounting standards* (Martani, 2012). Oleh karena itu, konvergensi IFRS adalah suatu keharusan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan standar akuntansi global. Atas kesepakatan tersebut, Indonesia mencanangkan untuk mengadopsi IFRS secara penuh mulai 1 Januari 2012. Selain untuk merespon peningkatan transparansi dan akuntabilitas, manfaat lain IFRS adalah memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui apakah tingkat kinerja perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta adakah dampak dari penerapan IFRS di Indonesia, oleh karena itu maka penulis tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut.

“PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SERTA PERBANDINGAN MASING-MASING VARIABEL SEBELUM DAN SESUDAH IFRS.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profitabilitas* yang diproksikan dengan ROA (*Return of Assets*) mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI?
2. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI?
3. Apakah ada perbedaan ROA, DER dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan (CSR) yang *listing* di BEI sebelum dan sesudah diterapkannya IFRS?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar tujuan penelitian tercapai, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan – perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode pengamatan tahun 2011 dan 2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengetahui apakah *profitabilitas* yang diproksikan dengan ROA (*Return of Assets*) mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI.
2. Mengetahui apakah *leverage* yang diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI.
3. Mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan (ROA dan DER) dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI sebelum dan sesudah diterapkannya IFRS.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menganalisis dan mengembangkan lebih jauh tentang pengungkapan sosial perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawabam sosial perusahaan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan perusahaan terutama dibidang sosial.